



**ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA
SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh

Amy Wardian Pratama¹⁾, Hailuddin²⁾ & Prayitno Basuki³⁾

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Email: wardian@bps.go.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan determinan kemiskinan rumah tangga antara tahun 2014 dan tahun 2018. Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai tambahan informasi dalam melakukan kegiatan perencanaan sekaligus evaluasi terhadap capaian program intervensi kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik, yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data Potensi Desa (Podes). Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik dengan variabel dependennya adalah status kemiskinan rumah tangga. Temuan dari penelitian ini diantaranya adalah 1) karakteristik rumah tangga yang resiko kemiskinannya mengalami penurunan dalam periode penelitian diantaranya adalah rumah tangga yang KRT-nya berkerja di bidang pertanian, rumah tangga yang tinggal di daerah yang memiliki fasilitas penerangan jalan, dan rumah tangga yang tinggal di desa; 2) karakteristik rumah tangga yang resiko kemiskinannya mengalami peningkatan dalam periode penelitian adalah rumah tangga yang dikepalai oleh seorang perempuan dan rumah tangga yang mendapatkan bantuan kredit usaha. 3) rumah tangga yang tinggal di desa memiliki resiko menjadi miskin yang lebih tinggi dibandingkan di kelurahan 4) rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan memiliki resiko menjadi miskin yang lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan.

Kata Kunci: Determinan Kemiskinan Rumah Tangga, Program Dana Desa & Regresi Logistik.

PENDAHULUAN

Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah hadirnya dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri (Kemenkeu, 2017).

Secara umum acuan penggunaan dana desa tertuang dalam Permendesa setiap tahun, yang pokok isinya antara lain adalah: 1) pembangunan desa yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, kemudian 2) pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Melalui program dana desa ini, pemerintah berharap dapat mengakselerasi penurunan kemiskinan yang di tingkat nasional terasa mulai melambat setelah tahun 2011. Jika pada kurun 2006-2011 kemiskinan nasional mampu berkurang dengan rata-rata sebesar 1,05 persen



setiap tahun, ternyata penurunan persentase kemiskinan pada periode 2011-2014 setiap tahunnya hanya berada di kisaran 0,41 persen.

Karena sasaran utama program dana desa secara khusus adalah penduduk miskin maka dalam merumuskan kegiatan prioritas dana desa idealnya selaras dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya dengan selalu memperhatikan faktor-faktor penyebab kemiskinan atau dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan. Supaya strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat mengurangi kemiskinan dan lebih tepat, efektif dan efisien (Nopriansyah dkk, 2015). Sehingga target SDGs pada poin pertama dengan slogan no poverty dapat tercapai pada tahun 2030.

Namun faktanya, data kemiskinan di NTB justru menunjukkan adanya fenomena perlambatan penurunan. Selama periode 2006-2020, kemiskinan di NTB setiap tahun turun dengan rata-rata sebesar 0,94%. Penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan kemiskinan selama tahun 2006-2013 yang pergerakan rata-rata penurunan kemiskinan per tahunnya mencapai 1,31%. Sedangkan pada periode berikutnya kemiskinan hanya mengalami rata-rata penurunan per tahun sebesar 0,57%.

Perlambatan kemiskinan tersebut sejalan dengan pernyataan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama bahwa program dana desa yang selama ini dijalankan belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena dana desa masih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi. Sementara itu program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan belum banyak tersentuh (medcom.id, 16 Januari 2020).

Dua permasalahan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penanganan kemiskinan adalah 1) keterbatasan

informasi kemiskinan yang tersedia dalam perencanaan prioritas intervensi kemiskinan dan 2) rendahnya kualitas data rumah tangga sasaran sebagai objek intervensi kemiskinan. Diantara kebutuhan informasi yang diperlukan dalam tahap perencanaan adalah data-data determinan kemiskinan.

Terkait permasalahan tersebut, penelitian ini akan menyajikan informasi determinan kemiskinan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan program dana desa. Kajian akan ditekankan pada dua periode yang berbeda yaitu tahun 2014 untuk merepresentasikan gambaran kondisi kemiskinan pada periode sebelum pelaksanaan program dana desa dan tahun 2018 untuk merepresentasikan gambaran kondisi kemiskinan pada periode pelaksanaan program dana desa. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pada karakteristik rumah tangga mana saja yang seharusnya dijadikan target prioritas intervensi penurunan kemiskinan.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan Menurut Konseptual

Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Berikut ini adalah penjelasan perbedaannya:

- a. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan.
- b. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang



diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan

Kemiskinan Menurut BPS

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs method). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) secara matematis: $GK = GKM + GKNM$.

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

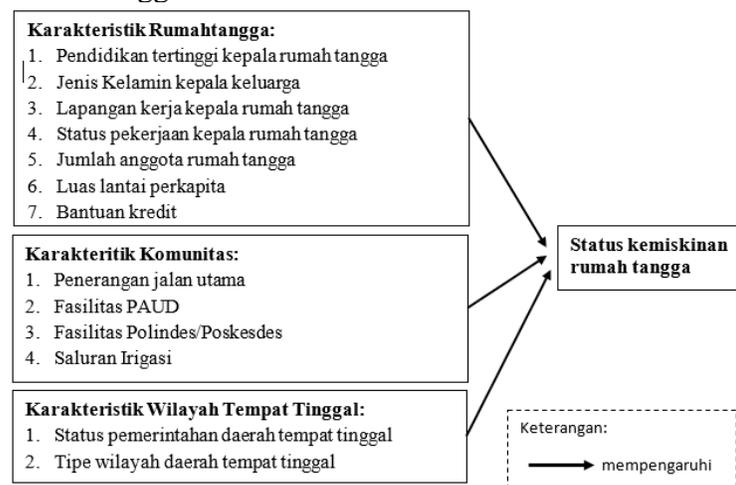
Kemiskinan Menurut World Bank

World Bank Institute (2005) menyatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari karakteristik individu dan rumah tangga yaitu karakteristik demografi

yang meliputi ukuran rumah tangga, usia, rasio ketergantungan dan jenis kelamin kepala rumah tangga, karakteristik ekonomi yang meliputi ketenagakerjaan, pendapatan, struktur pengeluaran konsumsi, kepemilikan properti rumah tangga dan aset keuangan (aset likuid, tabungan dan aset keuangan lainnya), serta karakteristik sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal.

Kerangka Pikir

Berikut ini adalah kerangka pikir penelitian ini yang menggambarkan dugaan adanya pengaruh karakteristik rumah tangga dan individu, karakteristik komunitas, serta karakteristik wilayah terhadap kemiskinan rumah tangga.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Metode analisisnya menggunakan analisis regresi logistic yang bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen (status miskin rumah tangga) dapat diprediksi melalui variabel independennya. Dalam Regresi Logistik, bentuk hubungan variabel dependen dengan variabel independen diuraikan sebagai berikut (Harlan Johan, 2018):

$$\pi(X) = \frac{e^{g(X)}}{(1 + e^{g(X)})} = \frac{e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_p)}}{(1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_p)})}$$



Penelitian ini, menggunakan variabel dependen bertipe non metrik dengan dua kategori, yaitu rumah tangga miskin atau rumah tangga tidak miskin. Bagi rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan atau kurang dari garis kemiskinan akan dikategorikan miskin dan diberi nilai 1. Sementara itu rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita di atas garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai rumah tangga tidak miskin dan diberi nilai 0.

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tipe data, yaitu data metrik dan data non metrik. Untuk variabel data bertipe non metrik yang mempunyai kategori lebih dari 2, seperti, variabel Pendidikan KRT, Lapangan pekerjaan KRT, Status pekerjaan KRT, dan Akses bantuan kredit, disesuaikan menjadi 2 kategori. Sehingga seluruh data independen bertipe non metrik memiliki dua kategori saja.

Variabel (1)	Deskripsi (2)	Jenis Data (3)
Y	Status kemiskinan rumah tangga	Non metrik (2 kategori): 1 = Miskin 0 = Tidak miskin
X ₁	Pendidikan KRT	Non metrik (2 kategori): 1 = SMP sederajat ke bawah 0 = SMA sederajat keatas
X ₂	Jenis kelamin KRT	Non metrik (2 kategori): 1 = Perempuan 0 = Laki-laki
X ₃	Lapangan pekerjaan KRT	Non metrik (2 kategori): 1 = Pertanian 0 = Non pertanian
X ₄	Status pekerjaan KRT	Non metrik (2 kategori): 1 = Informal 0 = Formal
X ₅	Jumlah ART	Metrik (Orang)
X ₆	Luas lantai per kapita	Metrik (meter persegi)
X ₇	Akses bantuan kredit	Non metrik (2 kategori): 1 = Tidak pernah mendapatkan 0 = Pernah mendapatkan
X ₈	Penerangan jalan utama	Non metrik (2 kategori): 1 = Ada 0 = Tidak ada
X ₉	Fasilitas PAUD	Non metrik (2 kategori): 1 = Ada 0 = Tidak ada
X ₁₀	Fasilitas Polindes Poskesdes	Non metrik (2 kategori): 1 = Ada 0 = Tidak ada
X ₁₁	Fasilitas Saluran Irigasi	Non metrik (2 kategori): 1 = Ada 0 = Tidak ada
X ₁₂	Status pemerintahan	Non metrik (2 kategori): 1 = Desa 0 = Kelurahan
X ₁₃	Tipe wilayah	Non metrik (2 kategori): 1 = Perdesaan 0 = Perkotaan

Tabel 1. Informasi Variabel Data Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Regresi Logistik Tahun 2014

Berikut ini adalah model peluang regresi logistik yang dihasilkan dari set data tahun 2014:

$$g(X) = \ln[\exp(-2,443 + 0,060 X_1 + 0,515 X_2 + 0,772 X_3 + 0,473 X_4 + 0,259 X_5 - 0,135 X_6 + 0,580 X_7 - 0,373 X_8 + 0,019 X_9 + 0,171 X_{10} + 0,022 X_{11} + 0,463 X_{12} - 0,813 X_{13})]$$

Secara sederhana model regresi logistik dari data tahun 2014 dapat memberikan gambaran bahwa peluang miskin rumah tangga di NTB akan semakin tinggi terjadi pada karakteristik: 1) Ruta yang KRT-nya yang berjenis kelamin perempuan, 2) Ruta yang KRT-nya yang bekerja di lapangan usaha pertanian, 3) Ruta yang KRT-nya yang bekerja di sektor informal, 4) Ruta yang jumlah ART nya semakin besar, 5) Ruta yang luas rumah per kapitanya semakin kecil, 6) Ruta yang tidak pernah mendapatkan akses bantuan kredit, 7) Ruta yang di



lingkungannya tidak terdapat penerangan jalan, 8) Ruta yang tinggal di wilayah desa bertipe perkotaan.

Model Regresi Logistik Tahun 2018

Berikut ini adalah model peluang regresi logistic yang dihasilkan dari set data tahun 2018:

$$g(X) = \ln[\exp(-2,479 + 0,839 X1 + 0,676 X2 + 0,539 X3 - 0,067 X4 + 0,230 X5 - 0,072 X6 + 0,372 X7 - 0,906 X8 + 0,221 X9 - 0,015 X10 + 0,156 X11 + 0,333 X12 - 0,813 X13)]$$

Secara sederhana model regresi logistik dari data tahun 2018 dapat memberikan gambaran bahwa peluang miskin rumah tangga di NTB akan semakin tinggi terjadi pada karakteristik: 1) Ruta yang KRT-nya yang memiliki pendidikan SMP sederajat ke bawah, 2) Ruta yang KRT-nya yang berjenis kelamin perempuan, 3) Ruta yang KRT-nya yang bekerja di lapangan usaha pertanian, 4) Ruta yang jumlah ART nya semakin besar, 5) Ruta yang luas rumah per kapitanya semakin kecil, 6) Ruta yang tidak pernah mendapatkan akses bantuan kredit, 7) Ruta yang di lingkungannya tidak terdapat penerangan jalan, 8) Ruta yang tinggal di wilayah desa bertipe perkotaan.

Perbandingan Odds Ratio 2014-2018

Sesuai dengan hasil pengujian signifikansi variabel secara parsial yang disajikan di subbab sebelumnya, maka nilai odds ratio yang akan dibahas pada subbab ini juga bersesuaian dengan variabel independent yang signifikan mempengaruhi variabel dependen saja. Secara ringkas, nilai odds ratio dari determinan kemiskinan rumah tangga tahun 2014 dan 2018 dapat dilihat di Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Nilai Odds Ratio Determinan Kemiskinan Rumah Tangga NTB Tahun 2014 dan 2018

No. Var	Nama Variabel	Odds Ratio	
		2014	2018
1	Pendidikan KRT	-	2,31
2	Jenis kelamin KRT	1,67	1,97
3	Lapangan pekerjaan KRT	2,17	1,71
4	Status pekerjaan KRT	1,60	-
5	Jumlah ART	1,30	1,26
6	Luas lantai per kapita	0,87	0,93
7	Akses bantuan kredit	1,79	1,45
8	Penerangan jalan utama	0,69	0,40
12	Status pemerintahan tempat tinggal	1,59	1,40
13	Tipe wilayah tempat tinggal	0,44	0,44

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh banyak aspek. Salah satunya adalah ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang berkualitas. Data ini diperlukan dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, data dan informasi kemiskinan dibutuhkan untuk menentukan target dan prioritas sasaran intervensi kemiskinan. Kemudian pada tahap evaluasi, informasi tersebut juga dibutuhkan sebagai indikator capaian pelaksanaan program intervensi kemiskinan. Diantara informasi dari nilai odds ratio yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program intervensi kemiskinan adalah:

- Pada variabel jenis kelamin (X2), nilai odds ratio menunjukkan perubahan negatif dari 1,67 pada tahun 2014 menjadi 1,97 pada tahun 2018. Artinya resiko kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga yang dikepalai oleh seorang perempuan meningkat pada periode tersebut.
- Pada variabel lapangan pekerjaan (X3), nilai odds ratio menunjukkan perubahan positif dari 2,17 pada tahun 2014 menjadi 1,71 pada tahun 2018. Artinya program pengentasan kemiskinan yang terkait dengan bidang pertanian memiliki dampak positif untuk mengurangi resiko rumah tangga menjadi miskin.
- Pada variabel jumlah ART (X5), perubahan nilai koefisien regresinya yang semakin



menurun mengindikasikan bahwa resiko kemiskinan rumah tangga yang memiliki banyak ART semakin menurun. Artinya beban pengeluaran rumah tangga tidak sebesar periode sebelumnya. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan mikro dari pemerintah yang berupa bantuan sosial, tunai maupun non tunai.

- d. Pada variabel luas lantai per kapita (X6), perubahan nilai koefisien regresinya yang meningkat menunjukkan bahwa keterkaitan antara ukuran luas fisik rumah dengan kesejahteraan penghuninya pada periode 2018 cenderung lebih lemah dibanding periode sebelumnya. Kecenderungan variabel luas lantai ini memiliki penjelasan yang sama dengan variabel jumlah ART.
- e. Pada variabel akses bantuan kredit (X7), nilai odds ratio memperlihatkan perubahan negatif dari 1,79 pada tahun 2014 menjadi 1,45 pada tahun 2018. Dengan pengertian lain bahwa kecenderungan menjadi miskin yang dialami oleh rumah tangga yang menerima bantuan kredit usaha meningkat dari 0,56 pada tahun 2014 menjadi 0,69 pada tahun 2018. Artinya akses rumah tangga terhadap bantuan kredit usaha tidak memperbesar peluang rumah tangga untuk terlepas dari jerat kemiskinan.
- f. Pada variabel penerangan jalan utama (X8), nilai odds ratio menunjukkan perubahan positif dari 0,69 pada tahun 2014 menjadi 0,40 pada tahun 2018. Artinya rumah tangga yang tinggal di wilayah yang memiliki infrastruktur penerangan jalan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan kondisi sebaliknya.
- g. Pada variabel status pemerintahan tempat tinggal (X12), nilai odds ratio menunjukkan perubahan positif dari 1,59 pada tahun 2014 menjadi 1,40 pada tahun 2018. Artinya kecenderungan rumah tangga yang tinggal di desa untuk menjadi miskin terlihat berkurang jika dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini merupakan indikasi

yang menggembirakan bahwa program dana desa memiliki dampak yang nyata terhadap upaya penurunan kemiskinan di wilayah desa.

Berkaitan dengan tahap perencanaan, berikut ini adalah beberapa informasi dari nilai odds ratio yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan prioritas pengentasan kemiskinan:

- a. Pada variabel daerah tempat tinggal menurut tipe wilayah (X13), resiko kemiskinan rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan pada tahun 2018 dengan nilai odds ratio sebesar 0,44 menunjukkan bahwa tinggal di daerah perkotaan ternyata memberikan resiko kemiskinan rumah tangga yang lebih tinggi. Berikutnya jika dilihat menurut status pemerintahan (X12) menunjukkan bahwa resiko rumah tangga yang tinggal di desa mengalami resiko kemiskinan yang lebih tinggi dibanding tinggal di daerah kelurahan. Hal tersebut ditunjukkan oleh odds ratio dengan nilai sebesar 1,40 tahun. Sehingga program intervensi kemiskinan sebaiknya dilakukan dengan memprioritaskan target sasaran rumah tangga penerima manfaat yang tinggal di wilayah desa yang bertipe perkotaan.
- b. Kemudian lebih khusus tentang data sasaran rumah tangga penerima manfaat, karakteristik yang sebaiknya dijadikan sebagai prioritas adalah sebagai berikut: a) Rumah tangga yang KRT-nya berpendidikan SMP ke bawah (X1); b) Rumah tangga yang di kepala seorang perempuan (X2); c) Rumah tangga yang KRT-nya bekerja di sektor pertanian (X3); d) Rumah tangga yang jumlah anggotanya banyak (X5); dan e) Rumah tangga yang secara kasat mata memiliki ukuran rumah sempit (X6).



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dinyatakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Determinan kemiskinan rumah tangga di NTB pada tahun 2014 diantaranya adalah variabel jenis kelamin KRT, variabel lapangan pekerjaan KRT, variabel status pekerjaan KRT, variabel jumlah ART, variabel luas lantai per kapita, variabel kredit usaha, variabel penerangan jalan utama, variabel status pemerintahan tempat tinggal, variabel tipe wilayah tempat tinggal.
- b. Determinan kemiskinan rumah tangga di NTB pada tahun 2018 diantaranya adalah variabel tingkat pendidikan KRT, variabel jenis kelamin KRT, variabel lapangan pekerjaan KRT, variabel jumlah ART, variabel luas lantai per kapita, variabel kredit usaha, variabel penerangan jalan utama, variabel status pemerintahan tempat tinggal, variabel tipe wilayah tempat tinggal.
- c. Variabel independen dari karakteristik komunitas yang terdiri dari fasilitas PAUD, fasilitas polindes/poskesdes, dan fasilitas irigasi tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di kedua periode penelitian.
- d. Dibandingkan dengan tahun 2014, karakteristik rumah tangga miskin pada tahun 2018 yang menunjukkan penurunan resiko menjadi miskin diantaranya adalah a) rumah tangga yang KRT-nya berkerja di bidang pertanian, b) rumah tangga yang tinggal di daerah yang memiliki fasilitas penerangan jalan, dan c) rumah tangga yang tinggal di desa.
- e. Dibandingkan dengan tahun 2014, karakteristik rumah tangga miskin pada tahun 2018 yang menunjukkan peningkatan resiko menjadi miskin adalah rumah tangga yang dikepalai oleh seorang perempuan dan

rumah tangga yang mendapatkan bantuan kredit usaha.

Saran

Anggaran yang digunakan pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan intervensi kemiskinan sangat terbatas. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka dalam menentukan prioritas sasaran intervensi pun perlu perhitungan yang cermat. Dari hasil penelitian yang telah disampaikan, berikut ini adalah dua saran prioritas target intervensi yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan program percepatan penurunan kemiskinan:

- a. Dari aspek lokasi tempat tinggal, rumah tangga yang berada di daerah desa perkotaan mempunyai resiko jatuh ke dalam jurang kemiskinan paling tinggi dibandingkan klasifikasi lainnya. Sehingga kelompok rumah tangga yang tinggal di klasifikasi wilayah ini seharusnya mendapat perhatian yang lebih dibanding klasifikasi wilayah lainnya (daftar desa menurut tipe wilayah dapat dilihat di Lampiran 16).
- b. Untuk sasaran penerima manfaatnya agar memprioritaskan rumah tangga dengan karakteristik: a) Rumah tangga yang KRT-nya berpendidikan SMP ke bawah; b) Rumah tangga yang di kepalai seorang perempuan; c) Rumah tangga yang KRT-nya bekerja di sektor pertanian; d) Rumah tangga yang jumlah anggota rumah tangganya lebih banyak; dan e) Rumah tangga yang secara memiliki ukuran rumah lebih kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AAIN Marhaeni, Sudibia I Ketut, dan Andika Gede (2020). Dana desa: Strategi Pengentasan Kemiskinan Desa. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- [2] Ayu Setyo Rini dan Lilik Sugiharti (2016). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. Vol. 1, No. 2.



- [3] Achintya Widhi Adnyani dan Lilik Sugiharti (2019). Profil Dan Determinan Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol.10, No.2.
- [4] Badan Pusat Statistik (2018a). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [5] Badan Pusat Statistik (2018b). Pedoman Pencacah Desa/Kelurahan Podes 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [6] Badan Pusat Statistik (2019). Konsep Dan Definisi Modul Ketahanan Sosial Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas September 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [7] Dirjen Perimbangan Keuangan (2017). Buku Pintar Dana desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [8] Erli Widhi Astuti (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus di Kabupaten Semarang). *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 7, No. 2.
- [9] Ghozali Imam (2001). Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Johan Harlan (2018). Analisis Regresi Logistik. Jakarta: Gunadarma.
- [11] Junaidi Zamhari, Darsono Wisadirana, Sanggar Kanto (2015). Analisis Determinan di Jawa Timur. *Jurnal Wacana*, Vol.18, No.1.
- [12] Nopriansyah, Junaidi, dan Etik Umiyati (2015). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspekti Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol.2, No.3.
- [13] NR Wulandari (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Kendari Tahun 2014. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* Vol.1, No.1.
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [15] Permendesa 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2017
- [16] Permendesa 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2018
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [18] Usman, BM Sinaga, dan H Siregar (2006). Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (SOCA)* Vol.6, No.3.